



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PERCERAIAN DARI PERKAWINAN RESMI
YANG DILAKUKAN DILUAR PENGADILAN AGAMA
DI DESA RENGASPENDAWA KEC. LARANGAN KAB. BREBES
(Studi Terhadap Faktor Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Oleh :

MIZZATUL IZZAH

NIM: 14112140047



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2015 M / 1436 H**



ABSTRAK

Mizzatul Izzah : “Perceraian dari Perkawinan Resmi yang Dilakukan
NIM. 14112140047 Diluar Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa
Kec. Larangan Kab. Brebes (Studi terhadap Faktor
Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan)”

Perceraian merupakan rusaknya hubungan perkawinan. Menurut aturan yang berada dalam kitab fikih klasik, bahwa talak dapat terjadi secara sepihak, yaitu dari pihak suami mengucapkan cerai. Namun dalam KHI pasal 115 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) ditentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami-isteri). Dalam kenyataannya masih ada sebagian masyarakat di desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes melakukan perceraian dari perkawinan resmi yang dilakukan diluar pengadilan agama. Praktek tersebut tentu berbeda dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini pada dasarnya berupaya mendeskripsikan tentang perceraian dari perkawinan resmi yang dilakukan diluar pengadilan menurut hukum di Indonesia. Dengan menempatkan desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes sebagai obyek penelitian, diharapkan dapat menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan perceraian diluar pengadilan dan akibat yang ditimbulkan terhadap perceraian diluar pengadilan agama di masyarakat Rengaspendawa.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode dan prosedur penelitian kualitatif. Penelitian ini pada akhirnya melahirkan beberapa temuan antara lain: *Pertama*, menurut KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa perkawinan dianggap putus atau mengalami perceraian apabila dilakukan dalam sidang pengadilan agama. Karena ditinjau dari segi tujuan hukum itu sendiri yakni untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan asas mempersulit terjadinya perceraian dalam undang-undang ini untuk adanya kemaslahatan bagi mantan istri dan anak-anaknya dalam perceraian. *Kedua*, faktor penyebab terjadinya cerai diluar pengadilan meliputi faktor ekonomi, masalah waktu, masalah pribadi yang harus ditutupi, faktor kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. *Ketiga*, akibat dari perceraian di luar pengadilan yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum, psikologi anak mengalami depresi dan relasi mantan istri dan suami tidak mengindahkan aspek silaturahmi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERCERAIAN DARI PERKAWINAN RESMI YANG DILAKUKAN DILUAR PENGADILAN AGAMA DI DESA RENGASPENDAWA KEC. LARANGAN KAB. BREBES (Studi Terhadap Faktor Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan)**” oleh **Mizzatul Izzah, NIM. 14112140047** telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal Agustus 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu pada Fakultas Syari’ah.

Cirebon, 30 Agustus 2015

Sidang Munaqosah

Ketua,
Merangkap Anggota



Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Sekretaris,
Merangkap Anggota

Ahmad Rofi'i, MA, LL.M
NIP. 19760725 200112 1 002

Anggota

Penguji I,

Ibi Syatibi, M.Si
NIP. 19770910 200901 1 011

Penguji II,

Wardah Nuroniyah, M. Si
NIP. 19811105 201101 2 006



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Penelitian Terdahulu	12
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sitematika Penulisan	20
BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	22
A. Perkawinan dalam Hukum Islam	22
1. Pengertian Perkawinan.....	22
2. Dasar Hukum Perkawinan	23
3. Tujuan Perkawinan	25
4. Syarat dan Rukun Perkawinan	26
5. Hikmah Perkawinan	29
B. Perceraian dalam Hukum Islam	31



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pengertian Perceraian.....	31
2. Dasar Hukum Perceraian	32
3. Macam-Macam Perceraian	34
4. Syarat dan Rukun Perceraian	45
C. Perceraian dalam Hukum Positif	47
BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA RENGASPENDAWA	51
A. Sejarah Desa Rengaspendawa.....	51
B. Letak Geografis.....	53
C. Keadaan Penduduk.....	53
D. Kehidupan beragama.....	56
E. Kondisi Ekonomi	58
F. Contoh Kasus Keluarga yang Melakukan Perceraian dari Perkawinan Resmi Diluar Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa.....	60
BAB IV ANALISIS PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN DI DESA RENGASPENDAWA.....	62
A. Perceraian diluar pengadilan menurut hukum di Indonesia.....	62
B. Faktor-faktor perceraian diluar pengadilan.....	71
C. Akibat perceraian diluar pengadilan	77
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam syariat Islam, perkawinan merupakan perjanjian yang kuat dan kokoh yang dengannya Allah mengikat pria dan wanita, sehingga mereka disebut suami-istri.¹ Bahkan perkawinan juga diartikan sebagai sebuah gerbang untuk membentuk keluarga bahagia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang menyebutkan: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*² Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Perkawinan hakikatnya merupakan salah satu fenomena penataan fitrah yang tersimpan dalam diri manusia, sebagai fitrah Allah Swt. dalam surat Yasin ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut :

¹Haidlor Ali Ahmad, dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Diberbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2007), hlm. 74.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2011), cet VI.

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : “Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan semuanya, diantara apa apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka sendiri dan apa-apa yang mereka tidak ketahui”.³

Begitu pula dalam Q.S. Ar-Rūm [30:21] yang menerangkan bahwa setiap manusia itu diciptakan berpasangan untuk melengkapi kekurangan dan membagi kelebihan yang dimiliki masing-masing individu.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Pada dasarnya kehidupan keluarga yang tentram dan diliputi rasa kasih sayang antar suami-istri tersebut merupakan dambaan setiap pasangan. Dan itu merupakan standar dalam membina kehidupan rumah tangga. Hal itu sesuai dengan firman Allah Swt. yang tercantum dalam surat diatas. Tujuan yang dimaksud adalah ketentraman yang tidak hanya lahir/fisik, lebih luas

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma' Arif, 1998), hlm. 399.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 406.



lagi adalah kasih sayang antara dua keluarga dan selanjutnya adalah cinta kasih antara kedua orang tua dengan anak-anaknya.⁵

Memelihara prinsip perkawinan adalah kewajiban bersama antara suami istri. Dengan demikian, peran untuk membangun dan mempertahankan keluarga bahagia menjadi kewajiban kolektif, suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam suatu lembaga perkawinan, setiap pasangan tidak hanya dituntut untuk melakukan serangkaian kewajiban, tetapi setiap pasangan juga memiliki sejumlah hak.⁶

Jika hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan secara ma'ruf, dengan menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing, niscaya hubungan antar pasangan akan tetap terjaga dengan baik sehingga kelanggengan dalam kehidupan rumah tangga dapat dicapai dan berjalan dengan mulus sesuai yang diharapkan.

Namun dalam kehidupan nyata, perkawinan yang selalu diharapkan oleh pasangan suami-istri agar dapat berlangsung mulus dan tidak ada halangan, kadang-kadang hanya merupakan harapan kosong. Karena kehidupan perkawinan tak selamanya berjalan mulus dan harmonis seperti yang diharapkan. Kerikil-kerikil kecil setiap saat bisa sering terjadi. Jika antara keduanya tidak mampu mengendalikan dan tidak ada niat untuk mencari solusi, maka penyelesaian lewat perceraian tidak bisa dielakkan. Ketentraman dan keharmonisan yang semula menjadi dambaan dan tujuan berkeluarga menjadi goyah, yang akhirnya tidak mampu dipertahankan.

⁵Haidlor Ali Ahmad, dkk, *Perempuan dalam Sistem...*, hlm. 120.

⁶Haidlor Ali Ahmad, dkk, *Perempuan Dalam Sistem...*, hlm. 4.



Ketentraman dan kedamaian yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka.⁷ Perceraian merupakan salah satu jalan untuk penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Bercerai adalah suatu ungkapan atau peristiwa yang mengandung kepiluan bahkan meneteskan air mata. Betapa tidak, karena peristiwa perceraian merupakan perlambang ketidak berhasilan manusia dalam mewujudkan cita-cita luhurnya dalam suatu ikatan mahligai perkawinan sebagai suatu hal yang kodrati bagi insan ciptaan Tuhan.

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁸ Menurut H. A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, PT Cipta Aditya Bakti, 1990), hlm. 169.

⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 2004), hlm. 103.



lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.⁹

Menurut hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan dalam perceraian, yaitu:

1. Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara (bisu). Termasuk dalam hal ini *talaq, ila'* dan *zhihar*.
2. Perceraian atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang di nilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya. Bentuk ini disebut dengan *Khulu'*.
3. Perceraian melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Bentuk ini disebut *Fasakh*.
4. Perceraian (putusnya pernikahan) atas kehendak Allah Swt. yaitu ketika salah satu dari pasangan suami-istri meninggal dunia.¹⁰

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan, yaitu

⁹Abdul Manan, "Problematisa Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", dalam *Jurnal Mimbar Hukum Al-Hikmah*, DITBINBAPERA, Jakarta No. 52 Th. XII 2001, hlm. 7.

¹⁰Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 17.



kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.¹¹ KHI juga menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri. Selanjutnya menurut KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri).¹²

Selanjutnya dalam Pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami istri dapat disebabkan karena:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Terjadi perselisihan antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

¹¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet. 2, hlm. 152.

¹²Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 dan Pasal 115, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), hlm. 45.



7. Suami melanggar taklik talaq, adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah.
8. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹³

Mengingat putusnya perkawinan yang dikarenakan talak suami terhadap istrinya terdapat beberapa macam yang tidak seluruhnya dapat dirujuk kembali, sehingga diperlukan pertimbangan yang bersifat prinsipal bagi seorang suami sebelum menjatuhkan talaknya. Demikian halnya dalam ajaran agama Islam, talaq merupakan perbuatan halal tetapi dibenci Allah Swt. Oleh karena itu menurut Mahmud Yunus diperlukan alasan-alasan bagi suami untuk menjatuhkan talaq terhadap istrinya yang diperbolehkan dan tidak dibenci oleh Allah Swt. terdiri dari:

1. Istri berbuat zina.
2. Istri nusyuz, setelah diberi nasehat dengan segala upaya.
3. Istri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga.
4. Sebab-sebab lain yang sifatnya berat, sehingga tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah tangga secara damai dan teratur.¹⁴

Sebagaimana pemaparan diatas bahwa putusnya sebuah perkawinan (perceraian) sesuai dalam konteks keindonesiaan khususnya dalam masalah

¹³Muhammad Yazid, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 153.

¹⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhad: Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), hlm. 113.



perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa : “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, artinya bahwa jika seseorang melaksanakan perkawinan yang sah maka apabila dia melakukan perceraian nanti harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Kemudian perceraian tersebut telah dianggap sah sehingga dia dapat melakukan perkawinan kembali. Akan tetapi, dalam ketentuan hukum Islam tepatnya dalam kitab-kitab fiqh klasik talak (perceraian) bisa terjadi atau jatuh dimana dan kapan saja terserah kepada suami karena memang talak menjadi “hak paten” suami. Hal ini pun dalam ayat al-Qur’an selalu menyebut lelaki yang menjadi pelaku hukum talak dan itu adalah pihak suami.¹⁵

Fenomena yang terjadi dimasyarakat terdapat 10 keluarga di Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes yang lebih memilih bercerai diluar pengadilan agama dibanding bercerai melalui pengadilan agama, padahal sewaktu menikah mereka melakukannya dengan perkawinan resmi. Maksud perkawinan resmi disini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu dengan di catatkan di KUA bukan nikah yang dibawah tangan atau nikah sirih. Padahal seharusnya masyarakat yang menikah dengan resmi maka perceraianya

¹⁵ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 208.



hanya akan dianggap sah (menurut hukum di Indonesia) ialah mereka yang melakukan perceraian di muka pengadilan dan ditetapkan oleh hakim.

Menurut Zaenuri sebagai tokoh agama mengatakan bahwa perceraian tanpa ke pengadilan hukumnya sah (menurut agama Islam), karena perceraian yang dilakukan melalui pengadilan hanya sebagai syarat administratif saja.¹⁶ Pendapat ini tentu membuat hukum perceraian yang hidup dimasyarakat setempat nampak tidak jelas. Karena di satu sisi masyarakat atau bahkan tokoh agama di Rengaspendawa telah menganggap perceraian dari pernikahan resmi yang dilakukan diluar pengadilan adalah sah, sedangkan disisi lain hukum di Indonesia mengatakan bahwa perceraian dari perkawinan resmi hanya akan sah jika dilakukan di pengadilan.

Menurut Rajuki selaku tokoh agama sekaligus merangkap sebagai lebe di Rengaspendawa, bahwa adanya perceraian diluar pengadilan karena dulunya menikahpun tidak melalui nikah resmi (nikah siri).¹⁷ Pendapat ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga yang melakukan perceraian diluar pengadilan padahal mereka telah menikah secara resmi. Adanya perceraian diluar pengadilan agama banyak mendatangkan mafsadat/madharat dibandingkan dengan maslahatnya, salah satunya adalah tidak terjaminnya hak-hak mantan istri dan anak, bahkan ironisnya pasca perceraian tersebut suami langsung meninggalkan istrinya dan memilih untuk menikah lagi. Padahal perceraian seperti ini juga mengakibatkan pelaku

¹⁶Hasil Wawancara Dengan Zaenuri, Selaku Tokoh Agama Desa Rengaspendawa, tanggal 15 Maret 2015 di dusun Kedawon.

¹⁷Hasil Wawancara Dengan Rajuki, Selaku Lebe di Desa Rengaspendawa, tanggal 15 Maret 2015 di dusun Kedawon.



perceraian diluar pengadilan tersebut tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut hukum negara. Oleh karena itu, ketika ada sebagian masyarakat bercerai diluar pengadilan, mengapa hal itu masih mereka lakukan. Meskipun pada dasarnya dalam hukum islam apabila suami mengucapkan cerai terhadap istri maka jatuhlah talak tersebut, namun perceraian diluar pengadilan akan menimbulkan akibat yang ditimbulkan mereka terhadap anak-anak mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik ingin mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul: **Perceraian dari Perkawinan Resmi yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes (Studi Terhadap Faktor Penyebab dan Akibat Yang Ditimbulkan).**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam pembahasan skripsi ini ialah Fiqih Munakahat khususnya tentang perceraian, yaitu adanya masyarakat desa Rengaspendawa yang melakukan perceraian dari perkawinan resmi diluar Pengadilan Agama.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya sebab dan akibat perceraian yang ditimbulkan karena terjadi perceraian dari



pernikahan resmi yang dilakukan di luar pengadilan agama yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di Indonesia.

c. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari melebar nya pokok masalah, maka penjabarannya dibatasi berkisar pada praktek dan akibat perceraian dari pernikahan resmi yang dilakukan diluar pengadilan agama dalam masyarakat desa Rengaspendawa.

2. Pertanyaan Penelitian

Berkenaan dengan masalah tersebut maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana perceraian dari perkawinan resmi yang dilakukan di luar pengadilan menurut hukum di Indonesia?
- b. Faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di luar pengadilan di Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes?
- c. Bagaimana akibat yang ditimbulkan terhadap perceraian diluar pengadilan agama di masyarakat Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini diharapkan untuk:
 - a. Mengetahui hukum perceraian dari perkawinan resmi yang dilakukan di luar pengadilan.
 - b. Mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perceraian dari perkawinan resmi yang dilakukan di luar pengadilan.



- c. Mengetahui bagaimana akibat yang ditimbulkan terhadap perceraian dari perkawinan resmi yang dilakukan di luar pengadilan agama di masyarakat Rengaspendawa.

2. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menekan terjadinya perceraian dari perkawinan resmi yang dilakukan di luar pengadilan dengan mengetahui sebab hukum dan faktor-faktornya.
- b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan akademik khususnya dan partisipasi aktif peneliti dalam studi agama.
- c. Sebagai bahan studi komparatif atau studi lanjutan pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan objek permasalahan ini.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Cici Indriyani, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010), dengan skripsinya yang berjudul Dampak Perceraian (Ceraai Talak) Diluar Prosedur Pengadilan Agama Terhadap Nafkah Iddah Dan



Nafkah Anak.¹⁸ Dalam skripsi ini secara umum membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap pernikahan, yang termasuk didalamnya masalah perceraian yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, terkait tentang nafkah iddah dan nafkah anak. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagaimana prosedur perkara perceraian diluar pengadilan agama. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi cici indriyani lebih fokus mengkaji terhadap nafkah iddah dan nafkah anak.

Defrianto, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), dengan skripsinya yang berjudul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Diluar Pengadilan Agama (Studi Di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya)*.¹⁹ Dalam skripsi ini membahas berdasarkan atas bagaimana pandangan atau pendapat dari tokoh masyarakat tentang hukum perceraian atau talak yang dilakukan diluar pengadilan agama. Persamaan dari skripsi ini adalah mempunyai persamaan tentang bagaimana talak yang terjadi diluar pengadilan agama, namun yang membedakannya adalah skripsi yang dibuat defrianto berdasarkan pandangan dari tokoh masyarakat dan dari segi letak objektifnya berbeda dengan yang saya buat.

Ajid, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2007), dengan skripsinya yang berjudul *Persepsi Ulama Serang Tentang*

¹⁸ Cici Indriyani, "Dampak Perceraian (Cerai Talak) Diluar Prosedur Pengadilan Agama Terhadap Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2010, tidak diterbitkan.

¹⁹ Defrianto, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Diluar Pengadilan Agama (Studi Di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya)", *Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2009, tidak diterbitkan.



Talak Dibawah Tangan.²⁰ Dalam skripsi ini lebih terfokus berdasarkan hanya pada pandangan ulama yang ada di Serang mengenai bagaimana persepsi ulama terkait talak atau perceraian yang terjadi secara tidak resmi (talak dibawah tangan).

Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang perceraian atau talak tidak secara resmi atau tidak berdasarkan dengan yang telah diatur dalam undang-undang, namun yang membedakannya adalah skripsi dari hasil penelitian Ajid ini hanya berdasarkan persepsi ulama tidak membahas tentang bagaimana akibat yang ditimbulkan dalam perceraian yang terjadi diluar pengadilan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Fenomenologi

Fenomenologi menempati kedudukan sentral dalam perkembangan metodologi penelitian kualitatif. Perspektif ini mengarahkan apa yang dicari peneliti dalam kegiatan penelitiannya, bagaimana melakukan kegiatan dalam situasi penelitian dan bagaimana peneliti menafsirkan beragam informasi yang telah digali dan dicatat semuanya sangat tergantung pada perspektif teoritis yang digunakan. Fenomenologi memandang perilaku manusia, apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan adalah sebagai suatu produk dari bagaimana orang melakukan tafsir terhadap dunia mereka sendiri. Dengan demikian perspektif fenomenologis adalah dalam rangka menangkap perilaku

²⁰ Ajid, "Persepsi Ulama Serang Tentang Talak Dibawah Tangan", *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2007, tidak diterbitkan.



seorang peneliti yang berusaha untuk melihat segalanya dari pandangan orang yang terlibat dalam situasi yang menjadi sasaran studinya tersebut (*participant's point of view*).²¹

Seperti halnya dalam penelitian ini peneliti memulai dengan sikap diam dan terbuka tanpa prasangka artinya tidak menganggap dirinya mengetahui makna dari berbagai hal yang terjadi dan ada pada orang-orang yang dipelajarinya. Sikap diam dan terbuka ini adalah usaha untuk bisa menangkap segala kemungkinan dengan pikiran tanpa prasangka dan tidak berpikir prediktif dengan para pelaku perceraian dari pernikahan resmi yang dilakukan diluar pengadilan.

2. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya atau mempelajari masyarakat khususnya gejala dalam masyarakat tersebut. Bernart Arief Sidarta mengemukakan: “Sosiologi hukum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berdasarkan analisis teoritis dan penelitian empiris berusaha menetapkan dan menjelaskan pengaruh proses kemasyarakatan dan perilaku orang terhadap pembentukan, penerapan, yurisprudensi dan dampak kemasyarakatan aturan hukum dan sebaliknya pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang”. Akan tetapi Sudjono Dirdjosiswono mengemukakan bahwa sosiologi hukum yaitu: “Ilmu pengetahuan hukum

²¹ Sutopo HB, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori-teori Pendukung Penelitian Kualitatif dan Penyusunan Kerangka Konseptual)*, (Surakarta:tp, 2002) , hlm. 123.



yang memerlukan studi dan analisis empiris tentang hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lain”.²²

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengkaji hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang dilakukan secara analitis dan empiris. Jadi dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori sosiologi hukum untuk mengetahui timbal balik dari adanya perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh mereka yang telah menikah dengan resmi, lebih jelasnya yaitu untuk mengetahui tentang sebab dan dampak yang ditimbulkan.

3. Teori Interaksi Simbolik / *Symbolic Interaction Theory*

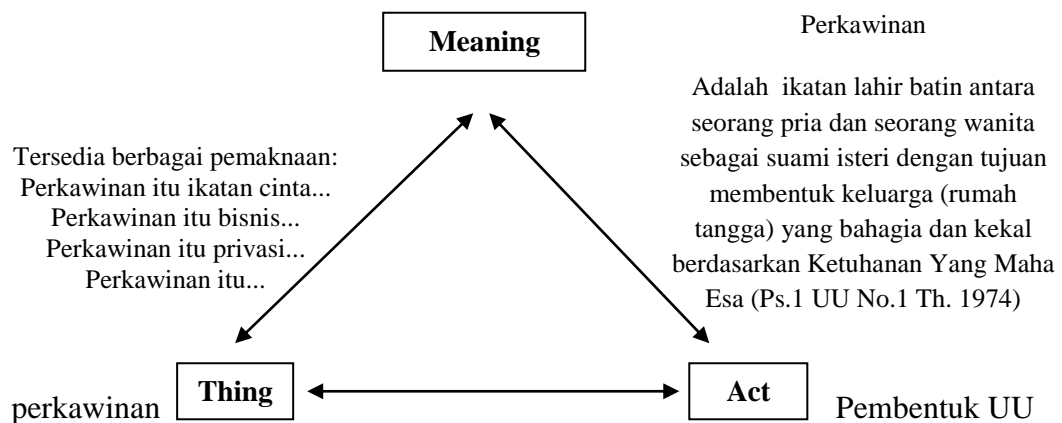
Teori interaksi simbolik mewarisi tradisi dan posisi intelektual yang berkembang di Eropa pada abad 19 kemudian menyeberang ke Amerika terutama di Chicago. Namun sebagian pakar berpendapat, teori interaksi simbolik khususnya George Herbert Mead (1920-1930an), terlebih dahulu dikenal dalam lingkup sosiologi interpretatif yang berada di bawah payung teori tindakan sosial (*action theory*), yang dikemukakan oleh filosof sekaligus sosiolog besar Max Weber (1864-1920).

Teori ini berasumsi bahwa pengalaman manusia diperoleh lewat interpretasi. Sebuah simbol atau obyek akan mempunyai interpretasi yang berbeda-beda tergantung siapa yang melihat.

²²Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I; (Jakarta: Pustaka Raya, 2006), hlm. 162.



Di bawah ini dapat dilihat gambar mengenai Kontak Sosial berdasarkan Interaksionisme Simbolik:



Catatan : Dari interaksi ini, ada kemungkinan suatu saat UU akan menyesuaikan pemaknaannya.²³

Teori ini akan digunakan oleh peneliti untuk mengetahui beberapa pemaknaan hukum dari perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh mereka yang telah melakukan perkawinan resmi itu. Disini tidak menutup kemungkinan peneliti akan memperoleh banyak pemaknaan hukum perceraian tersebut dari berbagai kalangan yang mengalami interaksi berbeda dalam kehidupannya. Misal, sebagian orang akan menganggap hal itu adalah lumrah karena telah menjadi budaya, tapi menurut sebagian orang lain menganggap bahwa hal itu telah melanggar hukum di Indonesia.

²³

<http://spencer2-sosilogihukum.blogspot.com/2011/06/4-teori-dalam-sosiologi-hukum.html> (diakses pada tanggal 18 Maret 2015, pukul 09.00 WIB).



F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data.²⁴ Penelitian ini terkait tentang pelaksanaan cerai diluar pengadilan agama dari perkawinan resmi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang di teliti yang bertujuan menggambarkan permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi lapangan (*field reseach*).

4. Sumber Data

- a. Data Primer: Data yang diperoleh dari sumber pertama.²⁵ Yaitu dengan memperoleh data dari wawancara langsung terhadap masyarakat yang terkait dan dari para tokoh masyarakat setempat dengan mengacu pada

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabetta, 2009), hlm. 4

²⁵ Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 12



perumusan masalah diatas guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pokok masalah.

- b. Data Sekunder: Data yang dikumpulkan pada waktu penelitian data ini telah tersedia.²⁶ Data ini di kumpulkan melalui studi pustaka dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan di antaranya *Fikih Munakahat, Fikih Perempuan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, dan buku-buku lain yang mempunyai hubungan dengan tema ini.

5. Teknis Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu :

- a. Observasi, adalah pengamatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang tampak pada objek penelitian.²⁷ Disini penulis mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan perceraian diluar pengadilan di masyarakat Rengaspendawa.
- b. Wawancara (*interview*), adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan, guna memperoleh keterangan yang lebih jelas dan terperinci.²⁸
- c. Dokumentasi, adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi ekonomi

²⁶ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 12.

²⁷ M Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, hlm. 143.

²⁸ Arif Subyantoro dan Fx. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Jakarta :Andi, 2006), hlm. 97.



masyarakat Rengaspendawa maupun kondisi budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Teknis Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis berusaha mengklasifikasikan untuk di analisis sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Analisis data ini dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu metode *Deduktif*. Artinya penulis berusaha memaparkan praktek perceraian diluar pengadilan agama pada masyarakat Rengaspendawa, kemudian melakukan analisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka di bawah ini penting untuk dijelaskan sistematika penulisan skripsi ini. Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan teoritis. Di dalamnya terdiri tentang pemaparan konsep perkawinan menurut hukum Islam dan perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif. Di samping itu dijelaskan pula tentang definisi perkawinan dan perceraian menurut hukum Islam, dasar hukum perkawinan dan perceraian, syarat-syarat dalam perkawinan dan perceraian, rukun-rukun perkawinan dan perceraian, macam-macam perkawinan dan perceraian, serta perceraian secara hukum positif.



Bab ketiga, mendeskripsikan tentang Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Dalam bab ini diketengahkan informasi mengenai sejarah desa, letak geografis, kondisi sosial budaya dan ekonomi, kondisi sosial keislaman, serta contoh kasus perceraian dari perkawinan resmi yang dilakukan di luar pengadilan agama yang terjadi di desa Rengaspendawa.

Bab keempat berisi pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perceraian diluar pengadilan agama. Di samping itu pembahasan diarahkan pula pada analisis akibat yang ditimbulkan terhadap perceraian dari perkawinan resmi yang dilakukan di luar pengadilan agama di masyarakat Rengaspendawa.

Bab kelima merupakan penutup. Dalam bab ini terdiri kesimpulan dan rekomendasi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan berdasarkan hukum di Indonesia

Perceraian dari perkawinan resmi yang dilakukan di luar pengadilan adalah perceraian tanpa pengajuan permohonan cerai, persidangan, maupun pembacaan ikrar talak di Pengadilan Agama padahal sebelumnya telah menikah resmi atau tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. perceraian seperti ini hanya dilakukan dengan ucapan talak yang dianggap sah oleh agama bukan negara. Perceraian menurut hukum di Indonesia tentu saja tidak sah karena menurut UU Perkawinan No.1 tahun 1974, KHI, dan UU Peradilan Agama dikatakan bahwa perkawinan dianggap putus atau mengalami perceraian apabila dilakukan dalam sidang Pengadilan Agama.

2. Faktor penyebab perceraian diluar pengadilan desa Rengaspendawa

1. Faktor ekonomi

Biaya persidangan yang begitu besar, memicu terjadinya perceraian diluar pengadilan. Hal ini dirasakan oleh masyarakat Rengaspendawa yang mayoritas rendahnya pendapatan perekonomian bahkan untuk makan sehari-hari kurang mencukupi, apa lagi mengikuti proses perceraian dipengadilan yang menurut mereka membutuhkan biaya yang mahal.

Hal ini sebagaimana yang dialami oleh pasangan suami istri ibu Uswatun Hasanah dan Bapak Abu Sujai yang melakukan cerai diluar pengadilan karena merasa terbebani oleh masalah hutang.

2. Masalah Waktu

Selain masalah biaya persidangan, ada juga faktor penting yang mengakibatkan mereka melakukan perceraian diluar pengadilan yaitu masalah proses persidangan yang lama, sedangkan mereka ingin perkara cerainya cepat selesai.

Hal ini sebagaimana yang dialami oleh pasangan suami istri ibu Munawaroh dan Bapak Wandu, Bapak Agung Handoyo dan Dewi Purwanti. Dapat disimpulkan hasil wawancara mengatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya yang sibuk dan menganggap dalam proses perceraian di persidangan yang berbelit-belit, membuat keluarga tersebut menunda untuk cerai secara prosedur pengadilan.

3. Masalah Pribadi yang Harus Ditutupi

Mereka menganggap perceraian yang dilakukan di pengadilan akan memberikan kesan negatif pada masyarakat karena baru beberapa bulan mereka melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh pasangan keluarga Herwanto dan Ningsih. Pernikahan mereka yang baru berusia 10 bulan dan telah dikaruniai 1 anak perempuan. Menurutny malu kalau langsung mendaftarkan gugatan cerai.

Selain itu, pasangan keluarga ibu Indriyani dan Ahmad zabidi yang mengatakan bahwa karena adanya desakan dari orang tuanya suami, suami menceraikannya yang baru berjalan beberapa bulan.



4. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

Berasal dari anggapan masyarakat yang mengatakan tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mengatakan perceraian harus melalui pengadilan, sah hukumnya walaupun tidak melalui pengadilan.

Hal ini sebagaimana yang dialami oleh pasangan keluarga M. Taupik dan Nur Azizah, pasangan keluarga ibu Kasriyah dan Bapak Wato, pasangan ibu Kastijah dan Warid, pasangan keluarga ibu Tarmi dan Wahud, dan pasangan keluarga ibu Nur Asiyah dan Purwanto

Lebih dari itu semua faktor yang melandasi kurangnya kesadaran hukum yang mendominasi dari masyarakat tersebut, seseorang harus mengerti dan menahami apa saja dampak nanti yang akan ditimbulkan apabila terjadi perceraian diluar pengadilan ini. Meskipun sebelumnya mereka telah menikah secara resmi di catatkan di KUA nyatanya kesadaran hukum itu tidak sepenuhnya dimiliki.

Dan diantara semua faktor penyebab yang ada diatas, perceraian antara suami istri dapat digolongkan karena adanya *syiqaq* atau perkecokan yang sering terjadi akibat banyaknya hutang yang harus ditanggung keluarga ini (faktor ekonomi). Sehingga sah menurut hukum Islam namun tidak sah menurut negara karena tidak dilakukan dalam sidang pengadilan sehingga perceraian mereka belum tercatat.

- c. Akibat yang ditimbulkan terhadap perceraian diluar pengadilan agama di masyarakat Rengaspendawa.

Dampak atau akibat perceraian tentu saja tidak hanya dirasakan oleh mantan pasangan suami istri, tetapi juga oleh orang-orang disekitar mereka



seperti anak-anak mereka. Perceraian juga mengakibatkan putus tali silaturahmi diantara keluarga besar yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri, bahkan terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri juga anak-anak mereka.

Pada beberapa anak mereka tidak hanya akan mendapat dampak psikologis ketika kecil saja tetapi juga dampaknya bisa berkelanjutan sampai mereka dewasa. Tidak sedikit anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan. Serta secara emosional kehilangan rasa aman di dalam keluarga, merasa tidak percaya diri, dan merasa tidak diinginkan oleh orang tuanya sehingga menyebabkan anak-anak depresi, tidak ceria, mudah marah, sulit berkonsentrasi saat belajar, dan takut memulai hubungan dengan lawan jenis karena takut merasa gagal seperti orang tuanya.

Perceraian yang tidak dicatatkan di Pengadilan Agama juga berakibat pelaku perceraian diluar pengadilan agama tidak mendapatkan akta perceraian yang diterbitkan Pengadilan Agama, yang berarti tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara resmi menurut hukum positif.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk aparat dan masyarakat desa

Diharapkan kepada aparat desa untuk aktif memberikan pengarahan dan wawasan terhadap masyarakat tentang perceraian diluar pengadilan, dan untuk masyarakat desa harus ada kesadaran, bahwa



perceraian harus dilakukan di pengadilan agama dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum.

2. Saran penulis terkait mengatasi faktor dan akibat perceraian diluar pengadilan

Karena sangat pentingnya perceraian secara resmi, maka untuk mengatasi perceraian diluar pengadilan dengan cara melakukan sosialisasi kesadaran hukum masyarakat dari instansi yang terkait.





DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Slamet, dan H.Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Ali, Ahmad, Haidlor dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Diberbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2007)
- Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Al-Hamdani, H.A.S., *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Budiardjo, Miriyam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT.Al-Ma'Arif, 1998)
- Ghazaly, Abd.Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, PT Cipta Aditya Bakti, 1990)
- Lubis, Ibrahim, *Agama Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Mahmud, Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968)
- Manan, Abdul, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Jakarta No. 52 Th. XII 2001
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Nurudin, Amir dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)



- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet. 2
- Ramulyo, Moh. Idris *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah. Terj. Muhammad Thalib*.(Bandung: PT Al-Ma`arif , 1987)
- Syahuri, Taufiqurrahman, *legislasi hukum perkawinan di Indonesia: pro-kontra pembentukannya hingga putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Shahih Muslim, *Maktabah Syamilah*, no hadis. 798
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004)
- Subyantoro, Arif dan Fx. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (jakarta: Andi, 2006).
- Sulaiman, Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut: Daar Ibnu Khazm, t.t)
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Sutopo HB, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori-teori Pendukung Penelitian Kualitatif dan Penyusunan Kerangka Konseptual)*, (Surakarta:tp, 2002)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Tihami, HMA dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013).
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I; (Jakarta: Pustaka Raya, 2006)
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokusindo Mandiri)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2011), cet VI.
- Yazid, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968)



Dokumen:

Arsip data desa Rengaspendawa tahun 2013

Hasil Wawancara Dengan Zaenuri, Selaku Tokoh Agama Desa Rengaspendawa, tanggal 15 maret 2015

Hasil Wawancara Dengan Rajuki, Selaku Lebe di Desa Rengaspendawa, tanggal 15 maret 2015

Hasil wawancara Talkhis HS, Sekertaris desa Rengaspendawa, pada tanggal 23 Juni 2015.

Hasil Wawancara dengan ibu Uswatun hasanah, pada tanggal 29 Juli 2015, pukul 11.45 WIB.

Hasil Wawancara dengan bapak M. Taupik, pada tanggal 4 Agustus 2015, pukul 13.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan ibu Kasriyah, pada tanggal 4 Agustus 2015, pukul 15.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan ibu Kastijah, pada tanggal 5 Agustus 2015, pukul 10.15 WIB.

Hasil Wawancara dengan ibu Tarmi, pada tanggal 5 Agustus 2015, pukul 13.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan ibu Munawaroh, pada tanggal 5 Agustus 2015, pukul 15.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan bapak Agung Handoyo, pada tanggal 6 Agustus 2015, pukul 10.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan keluarga Herwanto, pada tanggal 6 Agustus 2015, pukul 13.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan ibu Indriyani, pada tanggal 9 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan ibu Nur Asiyah, pada tanggal 9 Agustus 2015, pukul 13.45 WIB.

Hasil Wawancara dengan ustad Fatkhurahman, pada tanggal 2 Agustus 2015 pukul 19.30 WIB.

Website:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/3096/pdf>. (diakses pada tanggal 16 Maret 2015, pukul 00.40 WIB)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/pdf>. (diakses pada 16 Maret 2015, pukul 00.36 WIB)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/ekopratamaputra-fsh.pdf>. (diakses pada tanggal 16 Maret 2015, pukul 01.00 WIB)

<http://spencer2-sosilogihukum.blogspot.com/2011/06/4-teori-dalam-sosiologi-hukum.html> (diakses pada tanggal 18 Maret 2015, pukul 09.00 WIB)